



UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

01-018

RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
POLITIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN	801-01-018	MKKU	T=2	P=1	5	09 - 07 – 2021
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Jurusan	
	Dr. H. Fajar Tri Sakti, M.Si Dr. Ai Siti Farida.,M.Si		Dr. Ai Siti Farida.,M.Si		Kherul Umam, S.IP, SE, M.Ag.,CHRA	

Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
	KS-3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
	KS-9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
	KP-3	Menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan tata kelola pemerintahan
	KP-4	Menguasai konsep teoritis secara umum ilmu politik, dan teori sosial.
	KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	KU-3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	KU-7	Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data
	KU-8	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
	KK-1	Mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam governance publik seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik, baik ditingkat lokal maupun nasional, dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hankam dengan pendekatan ekonomi politik dan keislaman
KK-5	Mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa catatan kebijakan, uraian kebijakan, atau kertas kerja kebijakan untuk menghasilkan draft kebijakan	

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK-1	Setelah mengikuti mata kuliah Kapita Selektta Administrasi Publik, mahasiswa mampu: <ol style="list-style-type: none"> Memahami konsep teori politik dan kebijakan anggaran Menjelaskan hubungan antara politik dan anggaran Mengidentifikasi anggaran publik dengan anggaran private Memahami siklus anggaran yang ada pada politik dan kebijakan anggaran Menganalisis penggunaan teori politik untuk membuat kebijakan anggaran yang lebih baik
CPL → Sub-CPMK	

	CPL	Sub-CPMK-1. Menjelaskan rencana pembelajaran, dan kontrak belajar perkuliahan
		Sub-CPMK-2 Konsep dasar Politik dan Kebijakan Anggaran
		Sub-CPMK-3. hubungan antara politik dan anggaran
		Sub-CPMK-4. anggaran publik dan anggaran private.
		Sub-CPMK-5. siklus anggaran pemerintah pusat
		Sub-CPMK-6. siklus anggaran pemerintah daerah
		Sub-CPMK-7. otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
		Sub-CPMK-8. Anatomi anggaran pemerintah pusat dan daerah
		Sub-CPMK-9. advokasi anggaran.
		Sub-CPMK-10. siklus anggaran dan partisipasi masyarakat.
		Sub-CPMK-11. proses dan permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran nasional/daerah
		Sub-CPMK-12. Pengaruh utamaan Gender dalam perencanaan dan pengangggaran. .
		Sub-CPMK-13. kebijakan anggaran defisit, surplus dan seimbang
		Sub-CPMK-14. dinamika politik anggaran di Indonesia
Diskripsi Singkat MK	Dalam Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan bekal teori, analisis, maupun keterampilan teknis yang berkaitan dengan kebijakan anggaran pada mahasiswa di Indonesia. Sebagai mata kuliah pilihan untuk mahasiswa Ilmu Politik, peserta kuliah tentunya sudah mendapatkan bekal teoretis mengenai Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, Politik Lokal dan Otonomi Daerah atau mata kuliah pilihan lain seperti Birokrasi dan Politik, yang kesemuanya akan relevan dengan mata kuliah ini. Untuk itu referensi pada kuliah-kuliah tersebut menjadi dasar yang penting dalam mengikuti mata kuliah Politik dan Kebijakan Anggaran.	
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dasar Politik dan Kebijakan Anggaran 2. Hubungan antara politik dan anggaran 3. Anggaran publik dan anggaran privat 4. Siklus anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah 5. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 6. Anatomi anggaran pemerintah pusat dan daerah 7. Advokasi anggaran 8. Siklus anggaran dan partisipasi masyarakat 9. Proses dan permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran nasional/daerah 10. Penyetaraan Gender dalam perencanaan dan pengangggaran 	
Pustaka	Utama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. 2. Winardi, 2009, “ Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. 3. Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 4. Amir, Hidayat, Hatiadi Fithra Faisa, Raviyanto. (2016). Dinamika kebijakan fiskal : merespon ketidakpastian global. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 	
Dosen Pengampu	Dr. H. Fajar Tri Sakti, M.Si Dr. Ai Siti Farida.,M.Si	
Matakuliah syarat	Keuangan Negara / Administrasi Keuangan Negara / Pengantar Administrasi Keuangan Publik / Akuntansi / Ekonomi Makro / Manajemen Keuangan	

Pekan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Bentuk & Kriteria	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK 1 Mahasiswa Memahami tata tertib perkuliahan, RPS Mata Kuliah Politik dan kebijakan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian silabus & RPS • Penyampaian kontrak perkuliahan • Komitmen pembelajaran dan perkuliahan 	Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan Mahasiswa dalam menyetujui kontrak pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan MK • Diskusi Kelas [TM: (3x50”)] [PT+BM: (1+1)x(3x60”)]	<ul style="list-style-type: none"> • E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/ 	<ul style="list-style-type: none"> • RPS MK • Peraturan Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung • Tata tertib/kontrak kelas • Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. • Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. • Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	5
2	Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu Memahami serta menjelaskan bagaimana	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan Definisi konsep 	Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test &	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Materi • Diskusi Kelas 	<ul style="list-style-type: none"> • E-knows (E-Learning for Knowledge 	<ul style="list-style-type: none"> • Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan 	10

	konsep yang tertera dalam dasar Politik dan Kebijakan Anggaran	<p>politik dan kebijakan anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjabarkan Fungsi politik dan kebijakan anggaran 	<p>tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Partisipasi selama pembelajaran Ketepatan, dalam menjelaskan 	<ul style="list-style-type: none"> Cooperative Learning <p>[TM: (3x50”)] [PT+BM: (1+1)x(3x60”)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/ 	<p>daerah. Jakarta: Kencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	
3	Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu Memahami serta menjelaskan seperti apa hubungan antara politik dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Mendeskripsikan Filosofi anggaran Menganalisis Politisasi anggaran publik Menganalisis Pola hubungan politik dengan anggaran 	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>Bentuk non-test & tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Partisipasi Selama Pembelajaran Ketepatan dalam menjelaskan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Materi Diskusi Kelas Cooperative Learning <p>[TM: (3x50”)] [PT+BM: (1+1)x(3x60”)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/ 	<ul style="list-style-type: none"> Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	10
4	Sub-CPMK 4 Mahasiswa mampu Memahami antara anggaran publik dan anggaran privat	<ul style="list-style-type: none"> Definisi anggaran publik & privat Karakteristik yang membedakan anggaran publik & anggaran privat 	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>Bentuk non-test & tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Partisipasi selama pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Materi Diskusi Kelas Cooperative Learning <p>[TM: (3x50”)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/ 	<ul style="list-style-type: none"> Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku 	5

			<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dalam menjelaskan 	[PT+BM: (1+1)x(3x60”)]		<p>Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	
5	<p>Sub-CPMK 5 Mahasiswa mampu Menjelaskan siklus anggaran pemerintah pusat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan apa itu siklus anggaran • Menganalisis tahapan dalam penyusunan anggaran pemerintah pusat 	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test & tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi selama pembelajaran • Tugas • Ketepatan dalam menjelaskan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Materi • Diskusi Kelas • Cooperative Learning <p>[TM: (3x50”)] [PT+BM: (1+1)x(3x60”)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. • Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. • Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	5
6	<p>Sub-CPMK 6 Mahasiswa mampu Mengerti siklus anggaran pemerintah pusat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan siklus anggaran pemerintah pusat dan daerah • Tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah 	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test & tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Selama Pembelajaran • Tugas • Ketepatan dalam menemukan jawaban 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Materi • Diskusi Kelas • Collaborative Learning <p>[TM: (3x50”)] [PT+BM: (1+1)x(3x60”)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/mY/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. • Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. • Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, 	5

			<ul style="list-style-type: none"> Keakuratan informasi yang didapat 			Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar	
7	Sub-CPMK 7 Mahasiswa mampu Mengerti konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.	<ul style="list-style-type: none"> Mendesripsikan Definisi otonomi daerah Definisi Desentralisasi Fiskal Menganalisis Isu terkini otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terkini Menganalisis relevansi dari otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal 	Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test & tes: <ul style="list-style-type: none"> Partisipasi Selama Pembelajaran Tugas Ketepatan dalam menemukan jawaban Keakuratan informasi yang didapat 	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Materi Diskusi Kelas Collaborative Learning [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1)x(3x60")]	<ul style="list-style-type: none"> E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/mY/ 	<ul style="list-style-type: none"> Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. Winardi, 2009, "Manajemen Perilaku Organisasi," Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar Amir, Hidayat, Hatiadi Fithra Faisa, Raviyanto. (2016). Dinamika kebijakan fiskal : merespon ketidakpastian global. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 	10
8	Ujian Tengah Semester						
9	Sub-CPMK 8 Mahasiswa mampu mendalami anatomi anggaran pemerintah pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Struktur anatomi anggaran pemerintah pusat serta Struktur anatomi anggaran pemerintah daerah Perbandingan 	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> Partisipasi Selama Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Kelompok Contextual Learning Diskusi Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uins 	<ul style="list-style-type: none"> Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. 	10

		anatomi anggaran pemerintah pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Masalah • Ketepatan dan kebenaran materi yang disampaikan serta jawaban yang diberikan 	<p>[TM: (3x50”)]</p> <p>[PT+BM: (1+1)x(3x60”)]</p>	gd.ac.id/my/	<ul style="list-style-type: none"> • Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. • Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	
10	Sub-CPMK 9 Mahasiswa mampu memahami advokasi anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan Definisi advokasi anggaran • Menganalisis Konsep-konsep advokasi anggaran • Urgensi advokasi anggaran. 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Selama Pembelajaran • Pemahaman masalah • Ketepatan dan kebenaran materi yang disampaikan serta jawaban yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Kelompok • Contextual Learning • Diskusi Kelompok <p>[TM: (3x50”)]</p> <p>[PT+BM: (1+1)x(3x60”)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/) 	<ul style="list-style-type: none"> • Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. • Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. • Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	10
11	Sub-CPMK 10 Mahasiswa mampu Menemukan siklus anggaran dan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan Peran masyarakat dalam siklus anggaran • Menganalisis Manfaat yang diberikan siklus anggaran bagi masyarakat 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Selama Pembelajaran • Pemahaman masalah • Ketepatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Kelompok • Contextual Learning • Diskusi Kelompok <p>[TM: (3x50”)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/) 	<ul style="list-style-type: none"> • Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. • Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana 	10

			kebenaran materi yang disampaikan serta jawaban yang diberikan	[PT+BM: (1+1)x(3x60”)]		Prenada Media Grup, Jakarta. <ul style="list-style-type: none"> Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	
12	Sub-CPMK 11 Mahasiswa mampu menjelaskan Proses dan permasalahan penganggaran nasional/daerah	<ul style="list-style-type: none"> Menjabarkan Proses dan permasalahan penganggaran nasional/daerah Analisis Tahapan perencanaan dan penganggaran nasional 	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> Partisipasi Selama Pembelajaran Pemahaman Masalah Ketepatan dan kebenaran materi yang disampaikan serta jawaban yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Kelompok Contextual Learning Diskusi Kelompok [TM: (3x50”)] [PT+BM: (1+1)x(3x60”)]	<ul style="list-style-type: none"> E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/ 	<ul style="list-style-type: none"> Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	5

13	<p>Sub-CPMK 12 Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan pengarusutamaan Gender dalam perencanaan dan penganggaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan Definisi Pengarusutamaan Gender (PUG) • Menganalisis Pentingnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan dan penganggaran 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Selama Pembelajaran • Pemahaman Masalah • Ketepatan dan kebenaran materi yang disampaikan serta jawaban yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Kelompok • Contextual Learning • Diskusi Kelompok <p>[TM: (3x50”)]</p> <p>[PT+BM: (1+1)x(3x60”)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. • Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. • Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	5
14	<p>Sub-CPMK 13 Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan anggaran defisit, surplus dan seimbang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan Definisi Kebijakan anggaran defisit dan Definisi kebijakan anggaran surplus serta Definisi kebijakan anggaran seimbang • Analisis yang menjadi ciri karakteristik kebijakan anggaran defisit, surplus dan seimbang 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Selama Pembelajaran • Pemahaman Masalah • Ketepatan dan kebenaran materi yang disampaikan serta jawaban yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Kelompok • Contextual Learning • Diskusi Kelompok <p>[TM: (3x50”)]</p> <p>[PT+BM: (1+1)x(3x60”)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. • Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. • Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	5

15	Sub-CPMK 14 Mahasiswa Mampu mengerti dinamika politik anggaran di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan Permasalahan politik anggaran di Indonesia saat ini • Analisis relevansi antara proses penganggaran dan kepentingan politik • Menjabarkan Corak proses penganggaran dan kepentingan politik di Indonesia 	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Selama Pembelajaran • Pemahaman Masalah • Ketepatan dan kebenaran materi yang disampaikan serta jawaban yang diberikan • Tugas (Paper) 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Kelompok • Contextual Learning • Diskusi Kelompok <p>[TM: (3x50”)]</p> <p>[PT+BM: (1+1)x(3x60”)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-knows (E-Learning for Knowledge Sharing https://eknows.uinsgd.ac.id/my/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Karianga, H. (2013,2015). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana. • Winardi, 2009, “Manajemen Perilaku Organisasi,” Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. • Waluyo.2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).Bandung. Penerbit Mandar 	10
16	<i>Ujian Akhir Semester</i>						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
 2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
 3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
 4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
 5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
 6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator- indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
 7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
 8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
 9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
 10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
 11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
 12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan terstruktur, **BM**=Belajar mandiri.
-